

## RI Bayar Fee Terlambat Pakai Anggaran

JAKARTA, TRIBUN - Kementerian/Lembaga (K/L) ternyata 'malas' mencairkan pinjaman yang sudah dianggarkan terutama dari oleh institusi luar negeri. Akibatnya pemerintah terus nombok *commitment fee* utang luar negeri. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengakui realisasi pinjaman proyek kementerian/lembaga saat ini masih berjalan lambat.

"Sebetulnya ini adalah lebih ke pinjaman proyek, pinjaman proyek sempat lakukan *review* bahwa pinjaman proyek itu sudah ditandatangani, sudah diproses, tapi realisasinya lambat atau *progress project*-nya lambat," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jalan Wahidin Raya, akhir Minggu ini (25/11).

Akibatnya, lanjut Agus Marto, ada masa penarikan (*availability period*) yang seharusnya ditarik dalam waktu 3 tahun, terpaksa ditarik 6 tahun karena keterlambatan proyek. Atas keterlambatan pencairan tersebut, pemerintah diharuskan membayar *commitment fee*.

"Tentu yang kita secara financial (terkena), kadang-kadang pinjaman sudah tersedia, tidak direalisasi akhirnya pemerintah harus bayar *commitment fee*," tegasnya.

Oleh karena itu, Agus Marto menyatakan Presiden meminta jika ada pinjaman proyek, pinjaman kredit ekspor, dan pinjaman *commercial* atau proyek lainnya, perlu dibuat satu kontrak manajemen untuk menteri terkait realisasi ketepatan waktu.

"Di sidang satu bulan yang lalu sudah ditekankan, jadi untuk semua proyek-proyek yang berjalan di akhir tahun ini dan 2012 ke depan harus sudah jalan. Kontrak tersebut antara kementerian terkait dengan Kementerian Keuangan atau dengan Bappenas, nanti akan disepakati," ujarnya.

Meskipun demikian, Agus Marto menyatakan belum ada hukuman bagi kementerian/lembaga yang tidak merealisasikan rencana pencairan utangnya tepat waktu. "Belum kita definisikan tapi kontrak kinerja itu direview langsung Bapak Presi-

den," pungkasnya.

Masih malas belanja jelang tutup tahun anggaran, Agus Martowardojo lagi-lagi memanggil para pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L). Pemanggilan tersebut dilakukan hari Senin (28/11).

"Senin, saya harus membuka acara temu pimpinan untuk meminta K/L-nya merealisasikan anggaran dengan lebih efektif," ujar Agusnya.

Hal ini, lanjut Agus Marto guna memberikan penjelasan kepada K/L untuk mengoptimalkan anggarannya serta mempersiapkan pertanggungjawaban laporan kinerja dan keuangan sehingga bisa mendapatkan opini yang baik baik dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita yang 2011 ambil pelajaran bahwa kita lakukan penghematan ternyata kesiapan K/L untuk merealokasi penghematannya ke anggaran yang produktif itu tidak terlalu sigap sehingga realisasi juga tidak seperti yang diharapkan," tegasnya. (drc)